

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Ekonomi Nasional

1. Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi terdiri dari dua kata yaitu pembangunan dan ekonomi. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pembangunan adalah hasil pekerjaan membangun, sedangkan ekonomi adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan pengolahan barang industri, pertanian dan perdagangan.²⁵ Berdasarkan definisi ini dapat diketahui bahwa pembangunan ekonomi berarti adanya suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat menambah dan memperbaiki segala sesuatu menjadi lebih baik lagi. Adanya proses pembangunan itu diharapkan adanya kenaikan pendapatan riil masyarakat berlangsung untuk jangka panjang.

Secara umum ada tiga tahapan atau tingkatan pembangunan yang dialami oleh suatu negara mulai dari negara berkembang sampai menjadi negara maju, yaitu tahap pertama unifikasi (unification) dengan titik berat bagaimana mencapai integrasi politik untuk menciptakan persatuan dan kesatuan nasional, tahap kedua industrialisasi (industrialization) dengan fokus perjuangan untuk pembangunan ekonomi dan modernisasi politik, dan tahap ketiga negara kesejahteraan (social welfare) dimana tugas negara terutama adalah melindungi rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada tahap sebelumnya, dengan fokus

²⁵ Badudu, J. S., Sutan Mohammad Zain. 2001. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

utama kesejahteraan rakyat.²⁶

Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berlangsung pada setiap daerah di wilayah Indonesia harus disesuaikan dengan potensi dan prioritas yang dimiliki oleh masing-masing daerah sehingga keseluruhan pembangunan merupakan satu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional.²⁷

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses pembangunan yang terjadi terus menerus yang bersifat dinamis. Apapun yang dilakukan hakikat dari proses dan sifat pembangunan itu mencerminkan adanya terobosan yang baru, jadi bukan merupakan gambaran ekonomi suatu saat saja. Pembangunan ekonomi berkaitan pula dengan pendapatan perkapita riil, di sini ada dua aspek penting yang saling berkaitan yaitu pendapatan total atau yang lebih banyak dikenal dengan pendapatan nasional dan jumlah penduduk.

Indonesia sebagai negara yang kaya dengan SDA namun memiliki keterbatasan dalam kualitas SDM perlu merumuskan strategi kebijakan untuk dapat mewujudkan tiga tujuan pembangunan nasional (triple bottom line) secara simultan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan, pemerataan kesejahteraan kepada seluruh rakyat secara adil, dan terpeliharanya kelestarian lingkungan dan SDA. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut perlu dirumuskan

²⁶Dansur, "Peranan Hukum dan Ahli Hukum",
<http://www.blogster.com/dansur/peranan%20hukum-dan-%20ahli-hukum> (diakses pada 1 Desember 2022, pukul 19.38)

²⁷Choirullah, 2007. Ekonomi Pembangunan.

kebijakan-kebijakan pembangunan yang mencakup:

- a. Peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi secara berkelanjutan melalui penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menghasilkan produk yang kompetitif;
- b. Implementasi tata ruang wilayah secara konsisten untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan pangan nasional;
- c. Program diversifikasi pangan nasional melalui pengembangan pangan non beras untuk meningkatkan alternatif pangan rakyat menuju swasembada pangan;
- d. Pengembangan industri manufaktur yang mengandung nilai tambah (value added) yang tinggi sekaligus dapat menyerap tenaga kerja serta mendorong kegiatan ekonomi terkait.
- e. Pengembangan industri pendukung untuk memperkuat struktur industri nasional yang kokoh dan stabil bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi terkait.
- f. Peningkatan kualitas SDM melalui penguasaan dan penerapan Iptek dalam kegiatan bisnis dan ekonomi.
- g. Adanya dukungan politik (political will) dari semua unsur pemerintah yang terkait untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan kegiatan ekonomi.
- h. Meningkatkan etos kerja baik pada pengusaha maupun pekerja untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta secara simultan

mencegah dan memerangi setiap praktek yang dapat merusak sistem ekonomi seperti KKN, illegal logging, dan sebagainya.

2. Permasalahan Mendasar dalam Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional

Pembangunan ekonomi sangat mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, apabila pembangunan ekonomi pada suatu negara tidak berjalan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka akan sangat berpengaruh terhadap jalannya pertumbuhan ekonomi pada negara tersebut. Secara umum, permasalahan pembangunan ekonomi yang sering dialami oleh negara berkembang yaitu pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dalam distribusi pendapatan dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Hal ini menunjukkan ketidak merataan kesejahteraan masyarakat yang merupakan penghambat proses pembangunan ekonomi. Berikut ini adalah penjabaran dari beberapa masalah pembangunan ekonomi :

- Kemiskinan

Hal tersebut diakibatkan adanya siklus yang terjadi secara berulang dan sulit terselesaikan, yang sering diistilahkan dengan lingkaran kemiskinan yang merupakan serangkaian kekuatan yang saling mempengaruhi secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan tetap mengalami banyak kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi yang tujuan salah satunya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau mensejahterakan masyarakat, apabila semakin

banyaknya kemiskinan di suatu negara maka tujuan dari pembangunan ekonomi tersebut tidak terpenuhi atau tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Maka dari itu, banyaknya angka kemiskinan pada suatu negara sangat berpengaruh terhadap jalannya ekonomi.

- Pengangguran

Hal ini sudah tidak asing lagi ketika kita membicarakan masalah pengangguran yang ada di Indonesia. Pengangguran ini terjadi karena jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia dan masih adanya anak yang putus sekolah sehingga kesulitan untuk mencari pekerjaan serta terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK karena krisis global. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat akan berkurang sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru, dengan demikian tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.

- Ketimpangan dalam distribusi pendapatan

Ketimpangan distribusi pendapatan membuat jurang si kaya dan si miskin semakin curam yang mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial dan berpotensi untuk memicu terjadinya berbagai tindak kriminal. Ketimpangan dapat disebabkan oleh ketidaksetaraan Sumber Daya Alam (SDA), keahlian, bakat, dan kapital (sistem ekonomi

dimana perdagangan, industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar, pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya), serta strategi pembangunan yang tidak tepat yang berorientasi pada pertumbuhan.

- Tingginya angka pertumbuhan penduduk

Tingginya angka pertumbuhan penduduk disebabkan karena tingginya angka kelahiran di suatu negara, tingginya angka kelahiran disebabkan karena pada saat ini banyaknya atau maraknya pernikahan dini yang mengakibatkan kehamilan dini pula.

B. Macam-macam Sumber Daya Alam

1. Jenis sumber daya alam

dalam hal ini diklasifikasikan menjadi beberapa kategori karena adanya perbedaan, diantaranya : ²⁸

a. Berdasarkan sifat

- 1) Sumber daya alam yang selalu ada: Sumber daya alam yang tidak akan habis karena mengalami siklus panjang. Contohnya: air, cahaya matahari, serta energi yang diperoleh dari pasang-surut air laut.
- 2) Sumber daya alam yang dapat diperbaharui (renewable): Sumber daya alam yang jika persediaannya habis, dapat segera tersedia kembali

²⁸ Arif Zulkifli, "Dasar-dasar Ilmu Lingkungan", (Jakarta: salemba Teknika, 2014), hal. 29.

dalam waktu yang relatif cepat. Salah satu cara untuk memperbaharui adalah melalui reproduksi. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah hewan dan tumbuhan.

- 3) Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (nonrenewable): Sumber daya alam yang sulit atau bahkan tidak bisa tersedia kembali sebab membutuhkan waktu yang lama untuk dapat memperbaharui. Contoh: minyak bumi, gas bumi, batubara, bahan tambang, dan mineral lainnya.

b. Berdasarkan jenis

- 1) Sumber daya alam hayati (biotik): Disebut juga sumber daya alam biotik, sumber daya hayati meliputi benda-benda hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Contohnya adalah hewan, tumbuhan yang juga disebut dengan sumber daya alam nabati, serta mikroorganisme.
- 2) Sumber daya alam non-hayati (abiotik): Sebutan lain dari sumber daya alam non-hayati ialah sumber daya alam abiotik yang materinya meliputi benda-benda tak hidup seperti tanah, air, udara, serta bahan-bahan tambang.

c. Berdasarkan kegunaannya

- 1) Sumber daya alam penghasil bahan baku: Sumber daya alam yang materinya digunakan sebagai bahan

baku untuk membuat benda lain yang memiliki nilai guna tinggi. Contohnya hasil hutan seperti kayu, karet, dan beberapa jenis batuan.

- 2) Sumber daya alam penghasil energi: Sumber daya alam yang memiliki potensi atau materi untuk menghasilkan energi sebagai penunjang hidup manusia. Salah satu contoh penghasil energi adalah sinar matahari yang selain memiliki manfaat untuk menyinari alam semesta, juga berguna sebagai pembangkit listrik.

d. Berdasarkan nilai kegunaannya

- 1) Sumber daya alam non-ekonomis: Sumber daya alam yang tidak dikenakan biaya untuk mendapatkannya. Artinya, manusia dapat menikmati sumber daya alam tersebut tanpa pengorbanan sekecil apapun, sebab materinya sudah tersedia dan dapat ditemukan di mana saja. Contohnya udara, angin, dan tanah.
- 2) Sumber daya alam ekonomis tinggi: Sumber daya alam yang membutuhkan pengorbanan serta biaya yang relatif tinggi untuk mendapatkannya. Contohnya adalah benda-benda tambang, seperti emas, perak, dan intan.
- 3) Sumber daya alam ekonomis rendah: Sumber daya alam yang memerlukan biaya rendah untuk mendapatkannya serta persediaannya juga cukup

banyak. Contohnya adalah bahan-bahan bangunan seperti pasir dan batu.

2. Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti guna, laba atau untung atau bisa diartikan berfaedah, sedangkan pemanfaatan adalah proses dan perbuatan memanfaatkan sesuatu.²⁹ Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses, cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Istilah pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.³⁰ Berdasarkan tahapam pemanfaatan sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi 4 kategori, yaitu SDA potensial, SDA aktual, SDA cadangan, dan SDA stock :³¹

- a. Sumber daya alam potensial adalah SDA yang belum dipakai namun dapat dimanfaatkan di masa depan. Contoh dari SDA potensial adalah minyak bumi yang terjebak dalam batuan sedimen shale yang tidak dapat digunakan hingga dilakukan eksplorasi lebih lanjut.
- b. Sumber daya alam aktual adalah SDA yang telah disurvei, dikuantifikasi, diuji kualitasnya, dan sedang digunakan/dieksplorasi. Contoh dari SDA aktual adalah hutan produksi dan tambang minyak.
- c. Sumber daya alam cadangan adalah SDA yang belum digunakan, namun dapat dimanfaatkan secara menguntungkan di masa depan.
- d. Sumber daya alam stock adalah SDA yang sudah disurvei namun belum dapat dimanfaatkan karena teknologi yang tersedia belum cukup memadai.

²⁹ M. Sjamsidi dkk, *Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Baku*, (Malang: UB Press, 2013), hal. 12

³⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hal. 125

³¹ Warda Murti dan Sri Maya. 2021. *Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Widina Bhakti Persada Bandung. hlm 54

C. Tinjauan Pustaka Kelangkaan Minyak Goreng

1. Pengertian Kelangkaan

Kelangkaan berasal dari kata langka yang artinya dalam KBBI adalah jarang didapat; jarang ditemukan; jarang terjadi. Sumber daya yang jumlahnya terbatas disebut langka, ada yang sekali pakai habis sehingga tidak dapat diperbaharui atau di daur ulang, ada pula yang dapat dipakai berkali-kali, diperbaharui atau didaur ulang. Dalam kondisi apapun sumber daya adalah langka. Tanah misalnya semakin berkurang yang tersedia untuk dimanfaatkan baik untuk menjadi areal pertanian ataupun untuk maksud lain, udara tidak lagi menjadi benda bebas yang dapat diperoleh dengan mudah dan tidak tercemar.³² Contoh lain adalah minyak sawit yang merupakan sumber daya yang bisa diperbarui, diolah menjadi minyak goreng.

Minyak goreng merupakan salah satu dari sembilan bahan pokok yang penting bagi masyarakat Indonesia. Konsumsi minyak goreng masyarakat terbagi dalam dua kategori yaitu minyak goreng curah dan kemasan. Minyak goreng curah adalah minyak yang tidak memiliki merek dan diukur dalam satuan massa (kilogram).

³² Konta Damanik dan Gatot Sasongko. 2010. Pengantar Ilmu Ekonomi; Mikro Ekonomi. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah. hlm 22

Minyak goreng kemasan adalah minyak goreng yang diberi merek dan dikemas dengan botol, plastik refill, dan jerigen. Minyak goreng kemasan diukur dalam satuan volume (liter). Pada umumnya minyak goreng yang beredar di Indonesia berasal dari kelapa sawit.

Minyak goreng dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, baik yang berada di pedesaan maupun di perkotaan. Oleh karena itu, minyak goreng dapat pula dikategorikan sebagai komoditas yang cukup strategis, karena pengalaman selama ini menunjukkan bahwa kelangkaan minyak goreng dapat menimbulkan dampak ekonomis dan politis yang cukup berarti bagi perekonomian kita.³³

Minyak goreng juga merupakan salah satu produk kebutuhan rumah tangga yang digunakan untuk kebutuhan memasak. Peningkatan kebutuhan manusia dalam mengkonsumsi makanan akan cenderung meningkatkan permintaan produk minyak goreng. Banyaknya produk minyak goreng yang beredar di pasar seperti Bimoli, Sania, Tropical, Sunco, Filma, Avena, Madina, Kunci Mas, dan lain sebagainya dengan karakteristik (feature) dan keunggulan masing-masing mulai dari warna, kandungan gizi, kemasan, dan lain sebagainya semakin memacu para produsen untuk memasuki tingkat persaingan yang tinggi dalam mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasarnya agar jangan diambil alih oleh perusahaan competitor.

³³ Amang, dkk, 1996. Ekonomi Minyak Goreng di Indonesia. IPB Press. Bandung. hlm 12

D. Tinjauan Pustaka Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut KBBI, istilah penyalahgunaan wewenang ialah: “tindakan dalam menyalahgunakan kekuasaan dan hak dalam penyalahgunaan kekuasaan yang mengatur keputusan ”.³⁴ Penyalahgunaan wewenang yang termasuk sebagai bagian inti delik (*bestanddeel delict*) tindak pidana korupsi pada Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengemukakan, tiap individu yang dengan maksud mengambil keuntungan untuk kepentingan sendiri ataupun individu lainnya atau sebuah korporasi, penyalahgunaan wewenang, kesempatan ataupun sarana yang terdapat pada seseorang sebab kedudukannya yang bisa merugikan perekonomian negara. Selain itu tak dijabarkan lagi secara lengkap apa yang diartikan menyalahgunakan kewenangan maka bisa timbul implikasi interpretasi yang beraneka ragam. Perbuatan yang bisa dikelompokkan menjadi perbuatan “melawan hukum” bila perbuatan itu bertentangan dengan nilai kepatuhan dan keadilan masyarakat (melawan hukum materiil) dengan peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil).

Sementara terkait unsur “penyalahgunaan kewenangan”, berdasar kajian baik pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ataupun doktrin hukum pidana, sama sekali tak adanya pengertian dari konsep penyalahgunaan kewenangan yang disertai kualifikasi yang bisa dipakai dalam melaksanakan evaluasi apakah suatu tindakan bisa dikategorikan sebagai “penyalahgunaan kewenangan” ataupun bukan. Tercantumnya dua unsur tersebut,

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

menyalahgunakan wewenang dengan melawan hukum pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan timbul tidak jelasnya dalam penentuan konsep dan kualifikasi unsur “penyalahgunaan kewenangan”.

Hakikat dalam menyalahgunakan Kewenangan’ Indriyanto Seno Adji, dengan mengambil kutipan dari pendapat Jean Rivero dan Waline dalam hubungannya “*detournement de pouvoir*” dengan “*freis ermessen*”, memberi definisi terkait menyalahgunakan wewenang pada hukum administrasi bisa didefinisikan menjadi tiga wujud, yakni:³⁵

1)Penyalahgunaan kewenangan dengan maksud penyalahgunaan prosedur yang hendaknya dipakai agar tujuan tertentu yang hendak di capai bisa terwujud, namun telah mempergunakan prosedur lainnya supaya terlaksana. Dalam hakikatnya menyalahgunakan wewenang sangat berhubungan erat dengan adanya tidak sahnya dari sebuah keputusan ataupun tindak penyelenggaraan negara. Sadjijono, dengan menyitir pendapat Philipus M. Hadjon mengutarakan yaitu cacat yuridis keputusan ataupun tindakan penyelenggara negara biasanya bersangkutan dengan tiga unsur utama, yakni unsur substansi, kewenangan, serta prosedur, dengan begitu cacat yuridis tindakan penyelenggaraan negara bisa dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu, cacat substansi, wewenang, serta prosedur;

2)Penyalahgunaan kewenangan untuk melaksanakan perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan umum ataupun guna memperoleh

³⁵ Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, 2009. Surabaya, Laksbang Mediatama, Edisi Pertama, Cetakan Kedua. hlm 178

keuntungan kepentingan diri sendiri, golongan ataupun kelompok;

- 3)Penyalahgunaan kewenangan dalam maksud bahwa perbuatan pejabat itu ialah betul diperuntukkan untuk kepentingan umum, namun menyimpang dari maksud kewenangan yang dibagikan oleh UU ataupun peraturan-peraturan yang lain.

Pendapat Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W. Konijnenbelt menyatakan bahwa untuk mengukur penyalahgunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut: (a) unsur menyalahgunakan kewenangan dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan parameternya bersifat alternatif. (b) Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan atau *zorgvuldigheid* ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun Asas Kepatutan ini diterapkan apabila ada peraturan dasar, sedangkan peraturan dasar (tertulis) itu nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang mendesak sifatnya.³⁶

³⁶ Adji, Indriyanto Seno Adji. 2001. Korupsi dan Hukum Pidana. Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultasi Hukum, Jakarta, Kantor. Pengacara & Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan", hlm 75-76